

STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA MUER

Ade Sujastiawan¹, Donny Wijaya^{2*}, Muhammad Yamin³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: sandroacin@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 04 Juni 2025</i> <i>Revised: 08 Juni 2025</i> <i>Published: 30 Juni 2025</i>	Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi forum utama dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Muer, Kabupaten Sumbawa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan peserta Musrenbangdes, serta observasi langsung terhadap proses pelaksanaan musyawarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama partisipasi rendah berasal dari kurangnya informasi, keterbatasan pemahaman warga terhadap proses perencanaan, dan minimnya pelibatan kelompok marginal. Strategi yang dapat diambil mencakup peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas warga, serta pendekatan berbasis komunitas yang lebih inklusif.
Keywords <i>Pembangunan Desa;</i> <i>Strategi;</i> <i>Musyawarah;</i>	

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap prosesnya. Dalam konteks otonomi daerah dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga diharapkan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi dan menyusun program pembangunan desa secara partisipatif.

Desa Muer, sebagai salah satu desa di Kabupaten Sumbawa, telah rutin menyelenggarakan Musrenbangdes setiap tahunnya sebagai bagian dari mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Namun, dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat masih cenderung rendah dan terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip perencanaan partisipatif dengan kenyataan di lapangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Musrenbangdes, minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta dominasi elite lokal dalam forum-forum musyawarah. Kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin sering kali tidak mendapat ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasinya. Akibatnya, pembangunan desa kerap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan prioritas warga secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, perlu dirumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dan bermakna. Peningkatan partisipasi bukan hanya dilihat dari jumlah kehadiran, tetapi juga dari kualitas keterlibatan, keberanian menyampaikan pendapat, serta dampak nyata terhadap perencanaan pembangunan desa. Strategi ini harus mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat lokal, struktur kekuasaan desa, serta aksesibilitas informasi.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran konkret tentang kondisi Musrenbangdes di Desa Muer dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikannya forum yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan mengevaluasi faktor penghambat dan pendukung, serta menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan strategis yang aplikatif dan kontekstual untuk diterapkan di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena desa ini merepresentasikan dinamika pelaksanaan Musrenbangdes dengan tingkat partisipasi yang variatif.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, perempuan, pemuda, dan warga umum yang pernah atau belum pernah mengikuti Musrenbangdes. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan Musrenbangdes tahun terakhir dan mengkaji dokumen perencanaan seperti RKPDes dan laporan hasil musyawarah desa. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Muer dalam Musrenbangdes masih tergolong rendah, baik dari sisi kuantitas kehadiran maupun kualitas kontribusi dalam forum. Sebagian besar peserta yang hadir didominasi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat senior, dan wakil lembaga desa. Sementara itu, keterlibatan pemuda, perempuan, dan warga miskin masih terbatas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Musrenbangdes belum sepenuhnya berjalan sebagai forum inklusif yang mewakili seluruh kelompok masyarakat.

Salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Musrenbangdes. Banyak warga yang tidak mengetahui jadwal dan tujuan kegiatan, karena informasi hanya beredar di kalangan tertentu atau melalui media informal seperti obrolan warung dan pertemuan terbatas. Pemerintah desa belum memanfaatkan media komunikasi modern secara optimal, seperti media sosial atau pengeras suara masjid, untuk menyampaikan undangan dan informasi agenda musyawarah.

Selain itu, rendahnya literasi warga mengenai perencanaan pembangunan juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak warga yang merasa tidak percaya diri untuk hadir dan menyampaikan pendapat karena merasa tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan teknis. Dalam situasi seperti ini, forum musyawarah lebih sering diwarnai oleh dominasi elite desa atau perangkat yang sudah terbiasa dengan bahasa dan logika perencanaan.

Pendekatan strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini meliputi penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan partisipatif, pemberdayaan kelompok-kelompok marginal, serta penciptaan ruang musyawarah yang lebih ramah dan terbuka. Misalnya, sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, desa dapat mengadakan forum pra-musyawarah di tingkat dusun atau RT untuk menjaring aspirasi dari kelompok yang sulit menjangkau forum desa.

Strategi lainnya adalah dengan memperkuat peran kader pemberdayaan dan tokoh informal yang dekat dengan komunitas untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi warga. Kader dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah desa, serta memastikan bahwa isu-isu penting dari masyarakat akar rumput masuk dalam agenda Musrenbangdes.

Pemerintah desa juga perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan Musrenbangdes yang menekankan pada keterbukaan, penyampaian informasi yang merata, dan pelibatan aktif semua unsur masyarakat. SOP ini harus dijadikan acuan dalam proses perencanaan tahunan, termasuk mekanisme pengumpulan aspirasi dan penyusunan skala prioritas secara bersama.

Penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi, terutama bagi kelompok muda yang akrab dengan media digital. Penggunaan aplikasi desa, formulir digital, atau media sosial interaktif dapat menjadi saluran alternatif untuk menyampaikan usulan dan gagasan pembangunan secara lebih fleksibel dan terbuka.

Dengan strategi-strategi tersebut, Musrenbangdes diharapkan tidak hanya menjadi forum formalitas belaka, tetapi benar-benar menjadi ruang demokrasi partisipatif yang mencerminkan kepentingan seluruh warga desa. Proses perencanaan akan lebih akurat, responsif, dan berkelanjutan jika masyarakat merasa memiliki dan terlibat sejak awal dalam penentuannya.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Muer masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Rendahnya akses informasi, ketimpangan kapasitas antarwarga, serta minimnya keterlibatan kelompok rentan menjadi faktor utama yang perlu segera diatasi. Peningkatan partisipasi dapat dicapai melalui strategi yang menyentuh pada aspek komunikasi, pendidikan warga, dan reformasi mekanisme musyawarah. Pemerintah desa perlu menerapkan pendekatan yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemberdayaan komunitas melalui fasilitasi pra-musyawarah, penguatan peran kader lokal, serta pemanfaatan media informasi menjadi kunci dalam mewujudkan Musrenbangdes

yang lebih partisipatif dan berdampak. Dengan demikian, pembangunan desa akan lebih tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kemendagri.

Mubyarto. (2002). *Pengantar Ekonomi Pedesaan*. Jakarta: LP3ES.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.